

**STRATEGI OPTIMALISASI ASET DAERAH
DI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN KERINCI
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana
pada jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

LORA DEVINAWATI
BP : 04193003



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

Lora Devinawati, 04193003, Strategi Optimalisasi Aset Daerah di Sektor Pariwisata Kabupaten Kerinci dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengoptimalkan sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilatar belakangi beberapa hal yaitu Kabupaten Kerinci yang Mempunyai aset yang banyak khususnya dibidang pariwisata hal tersebut terbukti bahwa 70% objek wisata di Provinsi Jambi terdapat di Kabupaten Kerinci, untuk itu pemerintah Kabupaten Kerinci mengoptimalkan aset daerah disektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini mengacu pada konsep Mardiasmo yaitu strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengoptimalkan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan pariwisata dengan mengidentifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset. Ada 91 potensi aset yang telah diidentifikasi dan hanya 6 aset yang sudah dikembangkan. Dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci belum bisa memberi sumbangan yang optimal terhadap PAD karena pariwisata belum bisa menjadi sumber terbesar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun pemerintah juga mempromosikan objek wisata yang ada dengan mengadakan Festival Danau Kerinci yang telah menjadi event nasional. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah berusaha bekerja sama dengan pihak ketiga seperti dengan PHRI, mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Tapi dalam hal pengembangannya masih kurangnya sistem informasi tentang pariwisata, minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dan sumber daya manusia yang belum memadai. Sehingga peningkatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih belum optimal.

Kata kunci: *Strategi Optimalisasi, Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai Januari 2001. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena dalam prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya desentralisasi ke daerah sebagai harapan yang menjanjikan, maka perluasan wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana secara politis daerah memiliki kewenangan untuk menggali setiap potensi daerah. Jadi disini pemerintah daerah sebagai tombak dari implementasi otonomi daerah dalam menciptakan berbagai pendapatan daerah dan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan berbagai potensi daerah di setiap sektor.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga secara sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang dikatakan Soedjito yaitu: “Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat”.¹ Di sinilah daerah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung subsidi dari pusat, dan daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Oleh Karena itu daerah harus mempunyai inisiatif sendiri untuk meningkan pendapatannya yang tentu saja tidak bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku.

Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda, karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah dan besaran penduduk, sehingga

¹ Elita Dewi, ” Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Sumatera Utara, *Skripsi*, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

memungkinkan masing-masing daerah memberi penekanan yang berbeda-beda pada setiap sektor pemasukan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber yang dapat mendukung jalannya pelaksanaan otonomi daerah. Adapun yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah.² Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

² UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat dan Daerah

Sedangkan dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut menuju otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka salah satu indikasi dari kemampuan melaksanakan prinsip otonomi daerah tersebut adalah dengan terus menerus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena dari padanya diarahkan penyediaan dana dan APBD yang terus bertambah dari tahun ketahun.

Sejalan dengan perencanaan otonomi daerah, kepada setiap daerah jelas membawa konsekwensi yang besar terhadap kemampuan keuangan serta pengelolaannya. Sebab dengan diberlakukannya otonomi daerah maka semakin lama subsidi dan bantuan pemerintah pusat diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa kepada setiap daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang luas untuk menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seoptimal mungkin sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu jauh sebelumnya UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga memberikan peluang yang cukup besar untuk menggali dan mengelola penerimaan PAD secara optimal. Lahirnya kedua Undang-undang tersebut terutama Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk

³Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 169-170.

memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dimiliki oleh masing-masing daerah.

Di Indonesia sektor yang paling dominan dan banyak dikembangkan pada saat ini adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia pada saat ini menunjukkan peranan yang berarti dalam pembangunan perekonomian nasional, pariwisata juga sering disajikan sebagai jawaban atas beberapa masalah yang dihadapi Indonesia antara lain menciptakan lapangan kerja dan banyak peluang ekonomi, menjaga dan memperbaiki lingkungan, serta mendorong perekonomian regional.⁴ Hal tersebut didukung dengan potensi pariwisata di Indonesia antara lain:

1. Warisan budaya yang kaya, menjadi aset kunci meliputi: Sejarah keagamaan, seni, kerajinan, musik dan tari serta gaya hidup yang tradisional di berbagai daerah di Indonesia.
2. Bentangan alam yang indah dan panorama yang menarik meliputi: Gunung berapi, daerah pegunungan, daerah perbukitan, hutan hujan, pantai, pulau-pulau, dan lingkungan bahari.
3. Letak dekat dengan pasar pertumbuhan di Asia: Negara seperti Singapura, Hongkong, Jepang, Korea, yang mengalami pertumbuhan ekonomi.⁵

Dalam era otonomi daerah telah memberikan peluang bagi Kabupaten Kerinci untuk memiliki kemandirian dalam membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah dalam rangka

⁴ Frans Mardi Hartono, *Menjelang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan* : Perspektif perencanaan kebijaksanaan (Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan) ITB, Bandung, 1997, Hlm.47.

⁵ Bill Faulkner, *Perkembangan pariwisata Indonesia: perspektif "gambaran besar"* (Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan) ITB, Bandung, 1997, Hlm.9.

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. ⁶ Karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci masih bertumpu pada sektor Pertanian yang menyumbang sebesar 52,13 persen terhadap PDRB Kabupaten Kerinci terutama dari subsektor tanaman bahan makanan, kemudian berturut-turut sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 14,35 persen, sektor jasa-jasa sebesar 13,06 persen, sektor angkutan dan komunikasi sebesar 9,41 persen, sektor konstruksi 3,81 persen, sektor industri pengolahan sebesar 3,47 persen, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan sebesar 3,40 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,86 persen serta sektor pertambangan dan pengalihan sebesar 0,35 persen.⁷

Fondasi perekonomian di Kabupaten Kerinci masih berbasis di sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci, Provinsi Jambi, mesti mencari potensi lain yang ada di Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu potensi lain yang sangat besar dari Kabupaten Kerinci adalah menjadikan keindahan alam Kerinci sebagai obyek wisata. Sejak lama Kerinci merupakan daerah tujuan wisata yang potensial di Provinsi Jambi. Disamping udaranya yang sejuk, kawasan ini memiliki obyek wisata yang relatif lengkap.⁸

Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran, perbukitan yang bergelombang halus sampai perbukitan sedang dan pergunungan. Dari bentuk morfologi dan penyebaran batuan, maka orientasi kearah utara akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan gelombang sampai pergunungan, yang diikuti dengan variasi dan jenis

⁶ Dalam Rancangan Strategis Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2004-2009. hlm. 1

⁷ [http://www.kerincikab.go.id/info/Pertumbuhan Ekonomi](http://www.kerincikab.go.id/info/Pertumbuhan_Ekonomi). diakses 11 juni 2010 jam 13 WIB

⁸ <http://gresnews.com/ch/Lifestyle/cl/Kerinci>. Perekonomian di Kabupaten Kerinci Berbasis Pertanian, diakses 13 juni 2010 Jam 4:27 wib.

batuan yang ada, sedangkan pada orientasi kearah selatan akan dijumpai morfologi dataran rendah dan batuan yang relatif sejenis. Kondisi tofografi dan morfologi demikian, menyebabkan wilayah Kabupaten Kerinci memiliki potensi sumber daya yang besar dan keindahan alam yang sangat menakjubkan.⁹

Dari pemaparan diatas bahwa terlihat Kabupaten Kerinci memiliki banyak potensi wisata terutama objek wisata alam, di dalam RENSTRA Kabupaten Kerinci dikenal sebagai Kabupaten yang memiliki panorama alam terindah di Propinsi Jambi. Keelokannya menjadi terkenal dengan keberadaan gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera, air terjun telun berasap dan danau gunung tujuh di kaki gunung Kerinci. Keberadaan TNKS yang merupakan paru-paru dunia, hamparan Danau Kerinci, Danau Lingkat, serta peninggalan sejarah dan keunikan seni budayanya menjadikan keindahan Kerinci semakin mempesona, rona keindahan itu semakin memancar dengan adanya air Panas Semurup dan Sungai Medang serta bukit khayangan, menjadikan bumi sakti alam Kerinci bagaikan kahyangan swarga loka. Begitu indah dan lengkapnya pesona alam di Kabupaten Kerinci sehingga muncul sebutan yang agak bombastis yaitu “Kerinci bagaikan sekepal tanah surga di dunia.”¹⁰

⁹ [http://www.kerincikab.go.id/info/Kondisi Geografi](http://www.kerincikab.go.id/info/Kondisi_Geografi). Diakses 11 juni 2010 jam 12:45 wib.

¹⁰ <http://travel.kompas.com/read/2010/06/26/10452449/Kerinci..Surga.Dunia.Wisata>, diakses 7 Juni 2010 Jam 10:01 wib

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Kabupaten Kerinci memiliki banyak objek wisata itu terbukti dari 70% objek wisata di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Kerinci, Kekayaan dan potensi Kabupaten Kerinci ini juga diakui dunia sehingga dijadikan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat dimana kawasan ini menyimpan banyak potensi-potensi pariwisata yang belum digarap baik itu jenis wisatawan alam, wisata budaya (masih terdapat bekas-bekas perkampungan lama yang berada di kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat), dan wisata minat khusus. Kekayaan hutan TNKS meliputi juga Flora dan Fauna dengan spesies dan biota yang dilindungi oleh negara dan dunia. Melihat banyaknya potensi yang dimiliki hal ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Kerinci ingin menjadikan Kabupaten ini salah satu tujuan wisata dengan berusaha mengoptimalkan objek-objek wisata yang ada di Kerinci agar bisa menarik sebanyak-banyaknya wisatawan untuk datang ke Kerinci sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya. Dalam pengembangannya pariwisata Kabupaten Kerinci ini belum berjalan dengan maksimal, karena disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memenuhi persyaratan sehingga objek wisata tidak bisa dikelola secara baik. Belum adanya informasi yang memadai yang dapat memberi transparansi bagi masyarakat dan informasi bagi kemudahan wisatawan yang ingin mengunjungi Kabupaten Kerinci.

Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat disimpulkan bahwa dari empat faktor yang dikemukakan oleh Mardiasmo yaitu dengan mengidentifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset Kabupaten Kerinci disektor pariwisata, dengan mengidentifikasi maka pemerintah menemukan 91 objek wisata dan yang terinventarisasi baru 6 objek wisata yaitu Danau Kerinci yang telah merupakan Festival Nasional, air panas Semurup, air panas Sungai Medang, Bukit Khayangan, air terjun telun Berasap, dan Aroma Pecco yang telah memberi sumbangan terhadap PAD.

Dari teori tersebut ada beberapa yang tidak berjalan dengan semestinya yaitu pelibatan berbagai profesi atau keahlian dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Kurangnya sumber daya manusia pengelola dalam pengembangan objek wisata walaupun pemerintah Kabupaten Kerinci dalam hal ini menyatakan telah mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada aparaturnya. Namun keterbatasan anggaran pemerintah belum bisa memberi pelatihan dan pendidikan yang menyeluruh kepada aparatur yang ada sehingga pemerintah cuma bisa mengalokasi beberapa orang saja untuk di beri pelatihan. Dengan sedikitnya memberi pendidikan dan pelatihan kepada aparatur tentunya akan berimplikasi kepada kurangnya kreatifitas aparatur terhadap pengembangan pariwisata. Serta kurangnya pelibatan dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pariwisata seperti kerja sama dengan pihak ARSITA dan PHRI. Dalam kerjasamanya dengan PHRI tidak berjalan dengan baik karena para pengurusnya yang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing ini menyebabkan tidak berjalan dengan baik kerjasama PHRI dengan dinas pariwisata.

Sedangkan untuk sistem informasinya, walaupun pemerintah mengatakan telah berusaha memberikan transparansi dalam pengelolaan pariwisata tapi melihat dari sistem informasi yang baru dijalankan cuma berupa database saja dan dalam

pengembangan pariwisata pemerintah Kabupaten Kerinci belum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk dapat memberi promosi yang efektif dan efisien terhadap wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Padahal dengan pemanfaatan teknologi yang ada bisa memberikan kemudahan informasi terhadap wisatawan luar agar bisa mengunjungi wisata yang ada dikerinci sehingga ini mendatangkan jumlah kunjungan, semakin banyak orang yang mengenal kerinci maka semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung sehingga dapat pula memberikan peningkatan terhadap pendapat daerah.

Sedangkan pengawasan dan pengendaliannya, walaupun pemerintah mengatakan telah memberi pengawasan yang optimal. Namun dari pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di objek wisata terlihat banyaknya kerusakan terhadap fasilitas tersebut ini membuktikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dinas pariwisata. Padahal pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada merupakan salah satu faktor penunjang dalam pengembangan pariwisata karena dengan terpeliharanya fasilitas maka akan mengurangi pengeluaran terhadap pembangunan sehingga pemerintah tidak perlu membangun lagi fasilitas tersebut dan pemerintah cuma perlu memperbaiki saja. Kurang terawatnya sarana dan prasarana serta fasilitas di daerah objek wisata juga membuat objek wisata tersebut kurang menarik untuk dikunjungi sehingga para wisatawan yang datang juga merasa tidak nyaman ini dapat memberi efek terhadap penurunan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bryson, Jhon M. 1999. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Social*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bratakusumah, Supriady, Deddy dan Solihin, Dadang. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Drs. Bakaruddin. 2009. *Perkembangan dan Permasalahan Kepariwisata*, UNP Press. Padang
- Dewi, Elita. " *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*". Sumatera Utara, Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.
- Faulkner, Bill. 1997. *Perkembangan pariwisata Indonesia: perspektif "gambaran besar" (Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan)* ITB, Bandung.
- Halim, Abdul. 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, Bunga Rampai", UPP AMP YKPN, Edisi pertama, yogyakarta.
- Hesel Nogi S tangkilisan.2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta, Lukman Offset dan YPAPI.
- Hofer dan Schandel Dalam Daoed Joesoef.1981. *Pertahanan Keamanan dan Startegi Nasional*, Yayasan Proklamasi Centre for Strategic and Internasional Studies, Jakarta.
- Tarmizi, Ismail. *Strategi Kabupaten Solok Dalam Rangka Kembali ke Pemerintahan Nagari Menuju Otonomi Desa yang Demokratis (Kasus Kabupaten Solok Sumatera Barat)*. Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2002.
- Koswara, Ina, Herlina. 1998. *Konsentrasi Spesial dan Sektoral Fasilitas Penunjang Kepariwisata (Pariwisata Indonesia Menuju Keputusan Yang Lebih Baik)*, ITB Bandung.
- Koentraniggrat, 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Kaho, Riwu, Josef. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kurniawan, Hari. 2009, *Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Padang*, Skripsi tidak dipublikasikan. Ilmu Politik, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas.

- Moh. Nazir, Ph.D. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Moleong, lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Posdakarya, Bandung.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Salam, Setyawan, Dharma. 2007. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, PT. Djmbatan, Jakarta.
- Siahaan, Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Setianingsih, Wahyu. 2006. "Pengembangan Obyek Wisata Serulingmas Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara". Semarang: Skripsi Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Tangkilisan, Nogi S, Hessel 2004 *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik*, Yogyakarta: YPAPI.
- Zulfikri, Aulia, 2007, Strategi Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata, *Skripsi* tidak dipublikasikan. Ilmu Politik, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Situs dan Website

- <http://gresnews.com/ch/Lifestyle/cl/Kerinci>. Perekonomian di Kabupaten Kerinci Berbasis Pertanian, Di akses 13 juni 2010 Jam 4:27 wib.
- <http://strategika.wordpress.com/2007/06/24/pengertian-strategi/> diakses 4 November 2010 Jam 11:07
- <http://travel.kompas.com/read/2010/06/26/10452449/Kerinci..Surga.Dunia.Wisata>
- http://www.kerincikab.go.id/info/Kondisi_Geografi.
- <http://www.infojambi.gov>. diakses 10 Agustus 2010 Jam 09:05 wib
- http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ399.pdf , diakses 26 Desember 2010 Jam 10:11 Wib
- <http://asetdaerah.wordpress.com/2009/08/28/>. Diakses 25 Desember 2010 Jam 11:48 Wib
- <http://hendragforce.blogspot.com/2010/04/peran-penilaian-properti-barang-milik.html>, diakses 25 Desember 2010 Jam 11:48 Wib
- <http://www.manajemenasetpolban.web.id/berita-arsip-berita/19-berita-profesi-manajemen-aset.html>, diakses 26 Desember 2010 Jam 13:12 Wib

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0307/31/kha2.htm> , Diakses 26 Desember 2010 Jam 12:55 Wib

http://www.fokusparlemen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=586:optimalisasi-sumber-keuangan-daerah&catid=35:liputankegiatan, diakses tgl 26 Desember 2010 Jam 12:15 Wib

Dokumen

Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2007

Buku Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci

Kerinci Dalam Angka. Tahun 2004-2008

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2008.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kerinci Tahun 2009

Rancangan Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2004-2009

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Tahun 2004

UU No.33, Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat dan Daerah.*

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah